

# Tol dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh Alwin Basri



**PERTUMBUHAN** ekonomi memerlukan prasyarat infrastruktur yang memadai. Karena itu, kemudian pembangunan jalan tol menjadi salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang muaranya adalah kesejahteraan rakyat.

Jalur tol yang melewati Jawa Tengah dari Brebes sampai Solo diharapkan selesai akhir 2018 ini sebagai penanda beroperasinya Tol Trans Jawa. Dalam dimensi ekonomi pembangunan maka jalur tersebut memberikan alternatif bagi transportasi barang dan mengurangi beban jalur pantai utara (pantura) sehingga biaya transportasi diharapkan berkurang dan menambah keunggulan komparatif produk dalam negeri. Demikian juga arus penumpang, keberadaan jalur tersebut akan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kecepatan yang selama ini menjadi momok, khususnya pada saat arus mudik Lebaran.

Namun apakah beroperasinya jalur Tol Trans Jawa kelak akan menimbulkan eksese negatif terhadap sektor ekonomi kerakyatan?

Inilah sinyalemen yang saat ini sudah mulai dirasakan. Gambaran tersebut tampak dari mulai berkurangnya omzet para penjual telur asin di wilayah Brebes hingga Tegal, bahkan banyak dari mereka yang sudah gulung tikar dalam dua tahun terakhir. Toko oleh-oleh di jalur utama wilayah Brebes yang menjadi *showroom* telur asin kini tak lagi terlewati angkutan penumpang karena angkutan lebih memilih menggunakan jalan tol.

Kondisi yang sama tidak tertutup kemungkinan akan dialami oleh para penjual aneka oleh-oleh khas daerah di sepanjang jalur pantura yang jumlahnya mencapai ribuan.

Pada tataran itulah kemudian eksistensi Tol Trans Jawa berpotensi membunuh pelaku ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Dampak lanjutannya adalah bertambahnya jumlah pengangguran, berkurangnya penghasilan, dan jumlah rakyat miskin semakin besar. Hal inilah yang perlu diantisipasi, baik oleh pemerintah pusat, BUMN selaku operator jal tol, maupun

pemerintah daerah.

Masyarakat Indonesia memiliki budaya yang khas, yakni berpergian atau mudik dinilai kurang berkesan ketika tidak membawa oleh-oleh sebagai bagian dari penghargaan dan kasih sayang kepada orang yang dituju, baik keluarga maupun tetangga. Budaya inilah yang kemudian terbawa dalam budaya bertansportasi.

Dengan demikian, keberadaan *showroom* beragam oleh-oleh khas daerah sangat diperlukan karena hal itu tidak tergantikan. Meski sistem pen-



jualan *online* dapat menjadi alternatif, ada cita rasa yang berbeda ketika oleh-oleh tersebut dibeli langsung dan dibawa sendiri dalam perjalanan. Kondisi inilah yang tidak tergantikan.

## Akses Pelaku Ekonomi

Publik berharap jalan tol dapat dirasakan oleh semua orang, termasuk pelaku ekonomi kerakyatan. Pemberian akses dan ruang yang mudah dan murah adalah strategi awal untuk mengakomodasi para pelaku ekonomi kerakyatan yang terkena imbas operasi jalan tol.

Sebagai ilustrasi, di wilayah *rest area* Brebes misalnya, pedagang diberi kesempatan untuk berjualan telur asin dan beragam oleh-oleh khas lainnya dengan skema pembiayaan yang murah dan mudah. Demikian juga di wilayah

Tegal, ruang untuk penjual teh poci, tahu aci, dan berbagai jenis oleh-oleh khas daerah itu harus tetap ada.

Tentu semua itu perlu penataan yang sedemikian rupa sehingga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan para pengguna tol tetap terjaga. *Rest area* di jalur tol diharapkan menjadi etalase produk ekonomi kerakyatan di sepanjang jalur tol.

Ruang tersebut harus dibedakan dari ruang yang diberikan kepada waralaba-waralaba lain dengan modal besar. Hal ini bukan perkara diskriminasi, melainkan keberpihakan kepada wong cilik yang memerlukan proteksi dan dukungan kebijakan. Sebab, salah satu permasalahan masuknya pelaku ekonomi kerakyatan di wilayah *rest area* selama ini adalah biaya yang terlalu tinggi yang tidak terjangkau oleh mereka. Biaya sewa yang tinggi menyebabkan harga meningkat dan membahayakan konsumen.

Pada tataran tersebut, BUMN dan pemerintah pusat selaku operator jalan tol harus hadir untuk memberikan ruang, kemudahan, dan kemurahan bagi pelaku ekonomi kerakyatan untuk berjualan di *rest area* di sepanjang jalur tol. Demikian juga pemerintah daerah, fungsi pendampingan dan peningkatan kapasitas perlu dijalankan.

Kita berharap produk para pelaku ekonomi kerakyatan memiliki standar dan kualitas yang kompetitif. Karena itu, berbagai pelatihan dan pendampingan untuk mengarah ke sana menjadi sangat penting dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendampingan untuk memperoleh produk berstandar nasional, sertifikat halal, dan dokumen-dokumen penjamin lainnya adalah satu tahapan untuk mendorong peningkatan kualitas produk ekonomi kerakyatan.

Demikian halnya dengan manajemen usaha. BUMD juga perlu berpartisipasi melalui bantuan skema pendanaan. Inilah keberpihakan yang diharapkan segera hadir sehingga jalan tol dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara riil. (49)

—Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, anggota Fraksi PDIP.